



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 100.3.3.2/0072/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil, menjunjung nilai akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan suatu indikator sebagai tolok ukur pencapaian ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan;
- b. bahwa dalam rangka mengukur dan menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan indikator kinerja utama pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- c. bahwa agar indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja serta sinkronisasi target capaian program, perlu menetapkan indikator kinerja utama pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI SEMARANG,

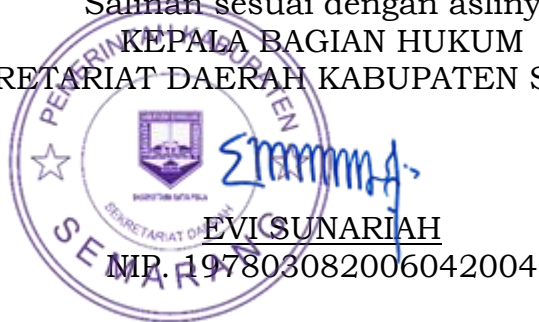
ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Perangkat Daerah;
 2. Anggota Tim; dan
 3. Arsip.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR: 100.3.3.2/0072/2026
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Formulasi	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kecondusifan wilayah dan kerukunan beragama		Jumlah Kejadian Konflik Sara	Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan	Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Menurunnya tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan wilayah	Angka kriminalitas	ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan dalam suatu populasi	jumlah kejahatan tahun N dibagi jumlah penduduk tahun N dikali 10.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Polisi Resor Semarang

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Formulasi	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Indeks Reformasi Birokrasi adalah gambaran tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Reformasi Birokrasi General memiliki bobot 100 dan Reformasi Birokrasi Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks Reformasi Birokrasi memiliki bobot 120	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Indeks Reformasi Birokrasi General	Reformasi Birokrasi General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso	Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi General memiliki bobot 100 yang terdiri atas indikator: 1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Formulasi	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7
					2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas 6. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 7. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang sudah diselesaikan 8. Survei Penilaian Integritas 9. Indeks Kualitas Kebijakan 10. Indeks Reformasi Hukum 11. Tingkat Digitalisasi Arsip 12. Indeks Pembangunan Statistik 13. Indeks Tata Kelola Pengadaan 14. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Formulasi	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7
					15. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Keuangan 16. Indeks Sistem Merit 17. Indeks BerAkhlak 18. Survei Kepuasan Masyarakat 19. Indeks Pelayanan Publik 20. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	
3	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia		Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan Badan Pusat Statistik)	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, yang mencakup tiga komponen utama: harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita. Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak	Indeks Pembangunan Manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran (sesuai perhitungan Badan Pusat Statistik)	Badan Pusat Statistik

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Formulasi	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan		Produk Domestik Reguler Bruto (PDRB) Per Kapita	Produk Domestik Reguler Bruto (PDRB) Perkapita menunjukkan nilai Produk Domestik Reguler Bruto per kepala atau per satu orang penduduk	$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHB/populasi}}{}$	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun dimana terjadi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa pada suatu wilayah	$\frac{(PDRB \text{ tahun } n - PDRB \text{ tahun } n-1)/PDRB \text{ th } n-1}{100} \times 100$	Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan	Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan emisi gas rumah kaca dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, Agriculture, Forestry, and Other Land Use, pengelolaan sampah	Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi gas rumah kaca yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks layanan infrastruktur merupakan rerata dari indeks infrastruktur dasar dan indeks infrastruktur permukiman	$(\text{Indeks infrastruktur dasar} + \text{Indeks Infrastruktur Permukiman})/2$	Dinas Pekerjaan Umum

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Pendidikan						
1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia inklusi dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, mendorong prestasi pemuda dan olahraga serta pelestarian kebudayaan		Indeks Pendidikan	Indeks pendidikan dioperasionalkan sebagai rata-rata dari indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan capaian pendidikan masyarakat di suatu daerah berdasarkan data Badan Pusat Statistik	(Indeks Rata-rata Lama Sekolah + Indeks Harapan Lama Sekolah)/2	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat untuk Menempuh Pendidikan	Harapan lama Sekolah	Lamanya bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Perhitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
				Rata-rata lama Sekolah	Rata-rata lamanya masa yang dilalui dalam menjalani pendidikan formal.	Perhitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Urusan Kesehatan						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Perhitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang	Dinas Kesehatan
2.2			Menurunnya kematian ibu dan anak	Jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu adalah Jumlah kasus kematian perempuan akibat sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab kecelakaan atau insidental), yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan pada kurun waktu tertentu.	Jumlah kematian ibu = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan
2.3				Jumlah kematian balita	Jumlah kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan dengan sebab kematian selain kecelakaan dan kematian tersebut tercatat dalam sistem pelaporan	Jumlah kematian balita = jumlah kematian anak usia di bawah 5 tahun dengan sebab kematian selain karena	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					nasional yaitu <i>Maternal Perinatal Death Notifications</i> (MPDN), dalam kurun waktu tertentu	kecelakaan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu	
2.4			Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi <i>stunting</i>	<p><i>Stunting</i> (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U)</p> <p>Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (<i>Z-score</i>) menggunakan baku antropometri anak balita <i>World Health Organization</i> (WHO) 2005.</p> <p>Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang</p>	Jumlah balita pendek dan sangat pendek dibagi jumlah balita yang ditimbang pada kurun waktu tertentu dikali 100% (berdasarkan data survei status gizi Indonesia)	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. a. Sangat pendek: $Zscore < -3,0 SD$ b. Pendek: $Zscore \geq -3,0 SD$ s/d $Zscore < -2,0 SD$		
2.5			Menurunnya angka kesakitan	Angka populasi bebas penyakit menular	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat perlindungan masyarakat terhadap dampak penyakit menular prioritas, dihitung dari rata-rata capaian beberapa komponen, yaitu: a. Orang Dengan HIV (ODHIV) baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ARV (<i>Antiretroviral</i>) b. Angka keberhasilan pengobatan TBC (<i>Tuberculosis</i>)	(Persentase ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ARV ditambah Angka keberhasilan pengobatan TB) dibagi dengan jumlah komponen	Dinas Kesehatan
2.6				Angka populasi bebas penyakit tidak menular	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat perlindungan masyarakat terhadap risiko dan	(Indeks SPM Hipertensi + indeks SPM Diabetes melitus +	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					dampak penyakit tidak menular, dihitung dari rata-rata capaian beberapa komponen, yaitu: a. Indeks Standar Pelayanan Minimal Hipertensi b. Indeks Standar Pelayanan Minimal Diabetes Melitus c. Persentase Kecamatan, Desa/Kelurahan yang membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok	persentase kecamatan, desa dan kelurahan yang membentuk satgas Kawasan Tanpa Rokok) dibagi jumlah komponen	
2.7			Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Ukuran proporsi ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan primer dan lanjutan di suatu wilayah yang memenuhi standar, meliputi: a. Fasilitas kesehatan primer 1) Minimal 80% desa memiliki setidaknya 1 (satu) Puskesmas Pembantu 2) Minimal 80% Puskesmas melayani ≤ 30.000 penduduk atau	Jumlah fasyankes (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakti) sesuai standar dibagi jumlah seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit dikali 100%	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					dapat diakses ≤ 120 menit b. Fasilitas kesehatan lanjutan tersedia minimal 1 (satu) rumah sakit kelas C atau sesuai kebutuhan standar pelayanan		
2.8				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	Ukuran proporsi fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) dengan akreditasi paripurna. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, tata kelola dan manajemen. Terakreditasi Paripurna adalah status tingkat akreditasi tertinggi yang	Jumlah fasyankes (Puskesmas, Rumah Sakit) yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2005-2029 dibagi jumlah fasyankes yang terintegrasi pada kurun waktu yang sama dikali 100%	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah: a. Memenuhi seluruh standar akreditasi secara penuh ($\geq 80\%$ capaian pada semua kelompok standar utama) b. Mampu menjamin keselamatan pasien, tata kelola klinis, dan tata kelola manajemen sesuai standar Kementerian Kesehatan c. Memiliki sistem peningkatan mutu berkelanjutan		
2.9				Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Ukuran proporsi penduduk yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan	Jumlah peserta JKN pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama dikali 100%	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kemajuan dan persebaran pemerataan infrastruktur, kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman serta penanganan kawasan kumuh		Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar = Rerata dari 7 komponen 1. Akses sanitasi layak 2. Akses Air Minum Layak 3. Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik 4. Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten 5. Persentase jumlah jembatan kondisi mantap kewenangan kabupaten 6. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum 7. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Indeks Infrastruktur Dasar = Rerata dari 7 komponen 1. Sanitasi 2. Air Minum 3. Jaringan irigasi 4. Jalan kondisi permukaan mantap 5. Jembatan kondisi mantap 6. Perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum 7. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2			Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap merupakan persentase dari panjang jalan Kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan. Perhitungan kondisi jalan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/SE/2023 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (<i>Provincial Kabupaten Road Management System</i>) dalam Kegiatan Preservasi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 22/SE/Db/2021 tentang Manual Aplikasi Sistem Program Pemeliharaan Jalan Provinsi/Kabupaten atau <i>Provincial/Kabupaten Road Management System</i> (PKRMS), Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022	<p>Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten yang dijaga dalam kondisi permukaan mantap/total panjang jalan kabupaten) x 100%</p> <p>Keterangan: Panjang jalan kabupaten kondisi mantap= Panjang jalan kabupaten kondisi baik + panjang jalan kabupaten kondisi sedang (dalam km) Total panjang jalan kabupaten dalam km</p>	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					tentang Penggunaan Aplikasi Provinsi/Kabupaten <i>Road Management System</i> di Provinsi Jawa Tengah, pengambilan data kondisi jalan dilakukan dengan metode visual dan <i>International Roughness Index</i> (IRI), dan analisis hasil penilaian kondisi jalan tersebut diperoleh dari aplikasi PKRMS.		
3.3			Meningkatnya kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/kota	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sitem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Penetapan kriteria	Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi maka ditetapkan bobot maksimal penilaian setiap Aspek dan Indikatornya sebagai berikut: 1. Aspek Kondisi Prasaran Fisik (bobot maksimal 45) 2. Aspek Produktifitas	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai indeks antara: s.d. Kinerja Sangat Baik 2. Nilai indeks antara: 70 s.d. 79 Kinerja Baik 3. Nilai indeks antara: 55 s.d. 69 Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian 4. Nilai indeks antara: < 54 Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian 	<p>Tanam (bobot maksimal 15)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10) 4. Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15) 5. Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5) 6. Aspek Kondisi P3A yang mencakup indikator (bobot maksimal 10) <p>Total nilai semua aspek maksimal 100</p>	
3.4			Meningkatnya layanan dasar pekerjaan umum	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	Mengacu pada capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	<p>Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)= (Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar Sebesar 20) +</p>	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						(Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima Layanan Dasar Sebesar 80)	
3.5			Meningkatnya kualitas kepatuhan izin mendirikan bangunan kabupaten	Rasio kepatuhan izin mendirikan bangunan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pembilang Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan perizinannya sesuai peruntukannya antara lain untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. - Penyebut Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan dan masih berlaku. 	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten = Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya/ jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku x 100%	Dinas Pekerjaan Umum
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kemajuan dan persebaran pemerataan infrastruktur, kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman serta penanganan kawasan kumuh		Indeks Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman = Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh keseluruhan berdasarkan Keputusan Bupati	Indeks Infrastruktur Permukiman = Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh keseluruhan	Dinas Pekerjaan Umum
4.2			Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku	Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi)= JRTHLTB (proksi)/(JRT x 100) a. PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak,	Badan Pusat Statistik

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>mutu lingkungan.</p> <p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m² 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak 	<p>terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>b. JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;</p> <p>c. JRT: Jumlah rumah tangga</p>	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3			Meningkatnya layanan dasar perumahan	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan	Mengacu pada capaian SPM Bidang Perumahan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)= (Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar Sebesar 20) + (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima Layanan Dasar Sebesar 80)	Dinas Pekerjaan Umum
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup berkelanjutan	Menurunnya risiko bencana Kabupaten Semarang		Indeks Risiko Bencana	Penetapan Hasil Penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas risiko bencana di Kabupaten Semarang	Bahaya (<i>Hazard</i>) x (Kerentanan (<i>Vulnerability</i>)/ Kapasitas (<i>Capacity</i>))	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.2			Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Penetapan hasil penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas kapasitas daerah dalam penyelenggaraan	Penilaian IKD terdiri dari 7 Parameter, Dalam 7 Parameter terdapat 7 Prioritas:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; dan 7. Pengembangan Sistem Pemulihan (Bencana) 	71 Indikator dan setiap Indikator

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci sehingga total ada 284 pertanyaan kunci.	
6	Meningkatnya kualitas penegakan Perda dan Perkada	Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penanganan kebakaran		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban di Masyarakat	Presentase penurunan gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat (trantibum tranmas)	Jumlah pelanggaran perda tahun ini - tahun lalu dibagi tahun ini x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6.1			meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkara, penanganan kebakaran	capaian SPM ketrentaman dan ketertiban umum dan kebakaran	Rata - rata dari korban penegakan perda dan respon time	Rata Rata Jumlah SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Urusan Sosial						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.	Jumlah PPKS tahun n-1 dikurangi Jumlah PPKS tahun n dibagi Jumlah PPKS tahun n x 100%	Dinas Sosial
7.2			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Garis Kemiskinan	Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan	GK= Garis Kemiskinan Makanan + Garis Kemiskinan Non Makanan	Dinas Sosial
8	Urusan Tenaga Kerja						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (umumnya 15 tahun ke atas). Angkatan kerja ini meliputi penduduk yang sedangDESAg bekerja maupun yang aktif mencari pekerjaan, dan TPAK mengukur seberapa besar potensi ketersediaan tenaga kerja untuk aktivitas ekonomi	TPAK= (Jumlah Angkatan Kerja)/(Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+tahun)) x 100%	Badan Pusat Statistik / Dinas Tenaga Kerja
8.2			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja di wilayah Kabupaten Semarang	a. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan: Merupakan rasio antara jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan didalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dengan total jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah tersebut dalam periode tertentu b. Melalui mekanisme layanan antar kerja: Mengacu pada prosedur atau sistem yang diterapkan oleh	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan/Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	Dinas Tenaga Kerja

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>instansi pemerintah atau lembaga terkait dalam menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Layanan ini bisa berupa bursa kerja, job fair, situs online resmi, atau layanan penempatan tenaga kerja lainnya</p> <p>Dalam wilayah kabupaten semarang: Batasan geografis dimana layanan antar kerja tersebut dioperasikan. Wilayah ini mencakup area administratif dari kabupaten semarang</p>		
8.3			Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan yang memiliki PKB adalah perusahaan yang memiliki serikat pekerja/serikat buruh yang terdaftar dan aktif. PKB adalah hasil kesepakatan bersama antara serikat pekerja dan pengusaha, yang	Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB/Jumlah perusahaan di kabupaten semarang x 100%	Dinas Tenaga Kerja

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					mengatur syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Perusahaan yang sudah memiliki PKB tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), yang umumnya dibuat oleh perusahaan tanpa serikat pekerja yang kuat		
9	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
9.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Inklusi dan Berdaya Saing	Meningkatnya pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Ukuran yang menilai kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik) dan partisipasi dalam pasar kerja	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan/Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki laki x 100	Badan Pusat Statistik

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2			Meningkatnya responsifitas gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Ukuran yang menunjukkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan Perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IPG mendekati 100 menunjukkan kesetaraan pembangunan genderyang tinggi antara laki-laki dan perempuan. IPG jauh di bawah 100 menunjukkan kesenjangan pembangunan yang besar, dengan capaian perempuan masih dibawah laki-laki	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki laki x 100	Badan Pusat Statistik
10	Urusan Pangan						
10.1	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan					

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2			Meningkatnya Ketercukupan pangan	Indeks Ketahanan Pangan <i>POU</i> (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Indikator yang digunakan untuk mengukur persentase populasi yang asupan energinya secara terus-menerus berada di bawah tingkat kebutuhan energi minimum harian yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas fisik normal dan menjaga kesehatan jangka panjang	Poin Prevelensi Konsumsi Protein/Periode Prevelensi	Badan Ketahanan Pangan Nasional
10.3			Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu konsumsi pangan, yang menunjukkan kesesuaian pola konsumsi pangan aktual dengan pola pangan ideal yang dianjurkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.	Angka PPH Kabupaten berdasarkan susenas	Badan Ketahanan Pangan Nasional
11	Urusan Pertanahan						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kemajuan dan persebaran pemerataan infrastruktur, kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman serta penanganan kawasan kumuh	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan rtrw	Ketaatan terhadap RTRW= $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum
12	Urusan Lingkungan Hidup						
12.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2				Persentase pengurangan sampah	Pembatasan, pemanfaatan, dan daur ulang yang dilaksanakan oleh masyarakat/KSM seperti Bank Sampah Unit, TPS3R, PDU, Pusat Olah Organik	nilai didapatkan dari Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.3			Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Nilai Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan terkait kualitas udara	Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Semarang, nilai didapatkan dari www.ppk1.menlhk.go.id/iklh	Dinas Lingkungan Hidup
12.4				Nilai Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan terkait kualitas air	Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Semarang, nilai didapatkan dari www.ppk1.menlhk.go.id/iklh	Dinas Lingkungan Hidup
12.5				Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah, dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Indeks ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti tipe	Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Semarang, nilai didapatkan dari www.ppk1.menlhk.go.id/iklh	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan luas tutupan lahan, stabilitas ekosistem, tingkat degradasi lahan dan fungsi lindung lahan.		
12.6				Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, d	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO: Sampah terolah (ton/hari) ST: Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA: Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD: Residu dari fasilitas pengolahan-daur	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>an/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;</p> <p>a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.</p> <p>b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya</p>	<p>ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Cara (2) SO= MFPD + DPA - RPD</p> <p>Keterangan: SO: Sampah terolah (ton/hari) MFPD: Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahandaur ulang sampah (ton/hari) DPA: Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD: Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah</p> <p>TS= TP X (TPRT + TPNRT)</p>	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan Pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah,</p>	<p>Keterangan: TS: Timbulan sampah (kg/hari) TP: Total populasi (orang) TPRT: Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</p> <p>Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah: Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)= [(Jumlah Pendauran Ulang Sampah (data IIc) + Pengolahan (data IIIf))/Timbulan</p>	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.</p> <p>Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.</p>	Sampah (data I)] x 100	
13	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Adminduk	Hasil Pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka, semakin tinggi nilai semakin baik layanan	(Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi) dikali nilai penimbang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.2			Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian)	(Rata-rata kepemilikan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, AKta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
14.1	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Terwujudnya kemandirian desa		Persentase Status Desa Maju	Status desa maju tiap tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal	Jumlah Status Desa Maju dibagi Jumlah seluruh Desa	Surat Keputusan Kementerian Desa tentang Status Desa

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
14.2			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Status Desa Berkembang	Status desa berkembang tiap tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal	Jumlah Status Desa Berkembang dibagi Jumlah seluruh Desa	Surat Keputusan Kementerian Desa tentang Status Desa
15	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
15.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Inklusi dan Berdaya Saing	Meningkatnya pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan yang digunakan Badan Pusat Statistik adalah metode geometrik.	Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk (menurut Badan Pusat Statistik): $(Pt/P0)^{1/t} - 1$ Keterangan: r: Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Pt: Jumlah penduduk tahun t (periode t) P0: Jumlah penduduk tahun awal (periode dasar) t: periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)	Badan Pusat Statistik

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
15.2			Terkendalinya Tingkat Kelahiran	Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total (TFR)	Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (biasanya usia 15-49 tahun)	Angka kelahiran/jumlah penduduk x 1000	Badan Pusat Statistik
16	Urusan Perhubungan						
16.1	Penguatan Pondasi Daya Saing Kemandirian Pangan dalam Keberlanjutan Kabupaten Semarang Berdikari	Meningkatkan Pelayanan Transportasi		Rasio Volume terhadap Kapasitas	Rata-rata rasio antara jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan terhadap kapasitas maksimum ruas jalan tersebut dalam satuan waktu tertentu.	Volume/Kapasitas Jalan	Dinas Perhubungan
16.2			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Transportasi	Rasio Konektivitas	Perbandingan antara jumlah trayek angkutan umum dengan total kebutuhan trayek angkutan umum yang direncanakan dalam wilayah kabupaten.	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan}) \div IK1$ (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah}$	Dinas Perhubungan

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	
17	Urusan Komunikasi dan Informatika						
17.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas Transformasi Pemerintah Digital, pengelolaan Data Statistik dan Keamanan Informasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintah Digital	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
17.2			Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Pencapaian tingkat kepuasan pengguna dengan metode tertentu dan mengutamakan strategi penilaian yang terintegrasi dengan layanan digital pengguna terhadap Layanan Digital Pemerintah Instansi, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi utama (proses bisnis utama) di Instansi Pusat dan layanan sektoral kepada masyarakat di Pemerintah Daerah, melalui penilaian kepuasan	Hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.3			Meningkatnya Pengembangan Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pemda	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital Instansi melalui pemanfaatan Jaringan Intra Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk interoperabilitas data dan informasi, serta integrasi antar sistem.	Hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
18.1	Meningkatnya Produktivitas sektor unggulan Daerah	Meningkatkan kualitas koperasi usaha mikro Perindustrian dan Perdagangan		Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	(Berusaha dibantu buruh tetap daerah/total angkatan kerja daerah) x 100%	Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
18.2			Meningkatnya akses permodalan koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah ¹ . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.	(Volume Usaha Koperasi Daerah/PDRB ADHB) x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
18.3			Meningkatnya kualitas pelaku usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	Mengukur tingkat pertumbuhan jumlah usaha mikro yang berizin di Kabupaten/kota	jumlah Industri Kecil Menengah berijin tahun ini (n) - Jumlah Industri Kecil Menengah berijin tahun lalu (n-1)/Jumlah Industri Kecil Menengah berijin tahun lalu (n-1)x 100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Urusan Penanaman Modal						
19.1	Meningkatnya Produktivitas sektor unggulan Daerah	Terwujudnya Pertumbuhan Investasi		Persentase pertumbuhan investasi	Jumlah Persentase Pertumbuhan Investasi	Jumlah Investasi Tahun (n) - Jumlah Investasi Tahun (n-1)/Jumlah Investasi Tahun (n-1) X 100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.2			Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Jumlah Capaian Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Seluruh Nilai Realisasi Penanaman Modal yang dihitung berdasarkan Total Seluruh Belanja Modal (Capital Expenditure) yang dilaporkan oleh Pelaku Usaha melalui Laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pada Tahun Berjalan	
20	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
20.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, mendorong prestasi pemuda dan olahraga serta pelestarian kebudayaan		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	<p>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kesejahteraan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi, serta gender dan inklusi.</p> <p>Indeks ini disusun untuk menilai sejauh mana pembangunan di suatu daerah telah mendukung potensi dan kualitas hidup pemuda (usia 16-30 tahun).</p>	<p>Adapun metode normalisasi yang digunakan dalam perhitungan IPP ini adalah dengan mengkombinasikan angka minimum dan maksimum bernilai 0 dan 100 beserta tren data. Berikut merupakan formula untuk menormalisasikan indikator apabila indikator memiliki arah positif.</p> $z_{ji} = 100 \times (X_{ijk} - X_{(ij)(min)}) / (X_{(ij)(max)} - X_{(ij)(min)})$ <p>Sementara apabila indikator memiliki arah negatif, formulasinya adalah:</p>	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						$z_{ji} = (-100 \times (X_{ijk} - X_{(ij)(\min)})) / (X_{(ij)(\max)} - X_{(ij)(\min)}) + 100$ <p>Setelah semua nilai indikator telah berhasil dihitung, selanjutnya dilakukanlah perhitungan nilai pada capaian masing-masing domain. Metode yang digunakan dalam perhitungan nilai domain adalah metode agregasi aritmetik. Formulasi yang digunakan pada tingkat domain adalah sebagai berikut:</p> $r_j = \sum_{(k=1)}^{m_j} [w_{ijnk} x_{jnk}]$ <p>rijn: Nilai indeks pada domain wij: Bobot pada masing - masing indikator Xij: Indikator</p>	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>nomor-j pada domain -i</p> <p>Lalu, formulasi pada tingkat indeks adalah sebagai berikut</p> $[IPP]_i = \sum_{k=1}^m [wt]_i [r_i]$ <p>IPPi: Nilai indeks IPP</p> <p>wti: Bobot pada masing-masing domain</p>	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
20.2				Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan olahraga di suatu daerah, baik dari sisi partisipasi masyarakat dalam olahraga, sumber daya manusia keolahragaan, ruang dan sarana olahraga, kebugaran jasmani, maupun prestasi olahraga.	Survey pengukuran IPO dilakukan di 4 kecamatan sebagai sampel, yakni Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan Tengaran. Data komprehensif keolahragaan yang dikumpulkan meliputi 9 (sembilan) dimensi IPO yang esensial, yaitu: 1) Sumber Daya Manusia Olahraga; 2) Ruang Terbuka Olahraga; 3) Literasi Fisik; 4) Partisipasi; 5) Kebugaran; 6) Perkembangan Personal; 7) Kesehatan; 8) Performa; dan 9) Ekonomi.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
20.3			Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan dan Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan diukur dengan membandingkan jumlah pemuda yang terlibat aktif dalam satu atau lebih organisasi kepemudaan terhadap jumlah seluruh pemuda dalam kelompok usia tertentu (16-30 tahun).	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan di kabupaten/kota dibagi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota dikali 100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
20.4				Peningkatan Prestasi olahraga (olahraga prestasi, rekreasi, dan paralimpic)	Peningkatan Prestasi Olahraga dioperasionalkan sebagai peningkatan capaian hasil olahraga pada tiga aspek utama, yaitu olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga paralimpik. Indikator yang digunakan meliputi jumlah medali yang diperoleh atlet, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi, serta prestasi atlet disabilitas di ajang nasional dan internasional.	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi pada event olahraga regional dibagi jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina di kabupaten/kota dikali 100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Urusan Statistik						
21.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik.						
21.2			Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi antar portal lintas sektor yang mengutamakan berbagi pakai data termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/Indeks Bhumandala), sesuai	Hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					dengan prinsip Satu Data Indonesia. Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.		
22	Urusan Persandian						
22.1			Meningkatnya Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digital	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keamanan siber meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan serta implementasi kontrol teknis keamanan lainnya berdasarkan instrumen kematangan keamanan siber yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.	Hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No 59 Tahun 2020. (Pada tahun 2025 namanya Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi)	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Urusan Kebudayaan						
23.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, mendorong prestasi pemuda dan olahraga serta pelestarian kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah. IPK menunjukkan sejauh mana upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.	Hasil penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan penilaian terhadap 7 dimensi penilaian yaitu: 1) Ekonomi Budaya 2) Pendidikan 3) Ketahanan Sosial Budaya, 4) Warisan Budaya 5) Ekspresi Budaya 6) Budaya literasi: dan 7) Kesenjangan Gender.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
23.2			Meningkatnya Pesta Seni dan Budaya	Persentase Seni dan Budaya yang Dilestarikan	Proporsi unsur seni dan budaya daerah (baik benda maupun tak benda) yang masih aktif dijalankan, diajarkan, atau dilestarikan oleh masyarakat dibandingkan dengan total unsur seni dan budaya yang teridentifikasi	Jumlah Seni dan Budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah Seni dan Budaya yang terdaftar/tercatat dikali 100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Urusan Perpustakaan						
24.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM)	$IPLM = \frac{\sum UPLM}{7/ALM} \times 100\%$ 7/ALM x 100 % Unsur Pembangun Literasi Masyarakat meliputi: 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan 2. Ketercukupan Koleksi 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan 5. Perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan Jumlah Anggota Perpustakaan ALM, Aspek Masyarakat	<i>Mandatory</i> Perpustakaan Nasional

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
24.2			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan digunakan untuk mengukur/menilai seberapa efektif perpustakaan digunakan oleh penggunanya	(Jumlah Pemustakan/Jumlah Penduduk) x 100%	<i>Mandatory</i> Perpustakaan Nasional
25	Urusan Kearsipan						
25.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan		Tingkat ketersediaan arsip (sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps 40 dan Ps 59 UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	T= Tingkat Ketersediaan Arsip A= Presentase Arsip yang telah dibuatkan daftar arsip i= Presentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip s= Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j= Presentase jumlah arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN $T = (a+i+s+j)/4$	<i>Mandatory</i> Arsip Nasional Republik Indonesia

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
25.2			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistim Kearsipan	Tingkat Digitalisasi Arsip	Tingkat Digitalisasi diperoleh dari nilai Hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik merupakan indeks Tingkat Digitalisasi Arsip yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Hasil Pengawasan dari Arsip Nasional Republik Indonesia	<i>Mandatory</i> Arsip Nasional Republik Indonesia
26	Urusan Kelautan dan Perikanan						
26.1		Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan		Persentase pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan	Persentase tingkat konsumsi ikan di suatu wilayah dalam satu tahun dibandingkan dengan standar kebutuhan konsumsi ikan yang ditetapkan oleh pemerintah, dinyatakan dalam satuan persen (%)	(Jumlah Produksi Perikanan/Jumlah Konsumsi Ikan) x 100	Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang (Susenas)
26.2			Meningkatnya jumlah produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah total hasil tangkapan atau budidaya perikanan yang diperoleh dalam periode tertentu (biasanya satu tahun) di suatu wilayah, dinyatakan dalam satuan berat (ton), mencakup perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					tangkap dan/atau perikanan budidaya		3. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan
27	Urusan Pariwisata						
27.1	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Ukuran persentase nilai tambah bruto (<i>gross value added</i>) dari sektor penyediaan akomodasi, makan, minum terhadap total PDRB suatu wilayah	(PDRB ADHB Penyediaan Akmamin/Total PDRB ADHB x 100) Keterangan: PDRB ADHB= Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku	Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang
27.2			Meningkatnya Kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan pariwisata Terhadap PAD	Terukurnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, bertambahnya jumlah kualitas lapangan kerja yang dibuka oleh industry pariwisata	Total Realisasi PAD Sektor Pariwisata (Pajak dan Retribusi)/Total Realisasi PAD dikali 100	1. Dinas Pariwisata (Retribusi Daerah Urusan Pariwisata) 2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang pendapatan asli daerah Sektor Pariwisata: a. Pajak Barang dan Jasa

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan</p> <p>b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan/M inuman</p> <p>c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan</p>
28	Urusan Pertanian						
28.1	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Meningkatnya produksi pertanian, perikanan dan ketahanan pangan		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persentase perubahan nilai tambah bruto sektor pertanian (tanpa migas) pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (riil), dari satu periode ke periode berikutnya (biasanya tahunan), yang mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi sektor pertanian di suatu wilayah	<p>PDRB sektor pertanian tahun n - PDRB sektorr pertanian tahun (n-1)/PDRB sektorr pertanian tahun (n-1)</p> <p>Catatan: Data menggunakan harga konstan agar mencerminkan pertumbuhan riil</p>	Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Persentase Peningkatan produksi komoditas Pertanian	Ukuran dalam bentuk persentase (%) yang menunjukkan pertumbuhan volume produksi suatu komoditas pertanian pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya	Produksi Komoditas pertanian tahun n - Produksi Komoditas pertanian tahun (n-1)/Produksi KOModitas pertanian tahun (n-1)	1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan
29	Urusan Perdagangan						
29.1	Meningkatnya Produktivitas sektor unggulan Daerah	Meningkatkan kualitas koperasi usaha mikro Perindustrian dan Perdagangan		Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan adalah persentase PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB. Sektor perdagangan yang menjadi kontributor terhadap PDRB: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	PDRB Sektor Perdagangan/PDR B) x 100%	Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang
29.2			Meningkatnya pelaku usaha yang berpotensi ekspor	Persentase pelaku usaha berpotensi ekspor	Pelaku usaha UMKM yang berpotensi ekspor adalah pelaku usaha yang memasarkan/menjual produk berkualitas yang berpotensi ekspor seperti kerajinan, produk makanan olahan, dan kopi	jumlah pelaku usaha UMKM binaan berpotensi ekspor/Jumlah pelaku usaha UMKM yang di bina x 100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
29.3			Meningkatnya ketersediaan	Disparitas Harga	Disparitas harga adalah perbedaan harga atas	(Harga komoditas di kabupaten kota	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			kebutuhan pokok dan barang penting		suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok)= 1. Beras Medium 2. Gula Pasir 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana 4. Daging Sapi Paha Belakang 5. Daging Ayam Ras 6. Telur Ayam Ras 7. Tepung Terigu 8. Kedelai Impor 9. Cabe Merah Keriting 10. Cabe Rawit Merah 11. Bawang Merah 12. Bawang Putih Impor Kating 13. Ikan Kembung	- Harga komoditas di provinsi)/Hrga komoditas di provinsi)) x 100%	Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
30	Urusan Perindustrian						
30.1	Meningkatnya Produktivitas sektor unggulan Daerah	Meningkatkan kualitas koperasi usaha mikro Perindustrian dan Perdagangan		kontribusi PDRB industri pengolahan	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Rasio PDRB Industri Pengolahan= Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan/Nilai PDRB Kabupaten X 100 %	Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Mengukur tingkat pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah yang berizin di Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah berizin tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah berizin tahun n-1 / Jumlah industri kecil dan menengah berizin tahun n-1 x 100%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Urusan Transmigrasi						
31.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia inklusi dan berdaya saing		Meningkatnya efektivitas pemberangkatan transmigran	Persentase transmigran yang diberangkatkan	Transmigran yang diberangkatkan adalah penduduk Kabupaten Semarang yang dipindahkan dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang padat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan penduduk, dan perpindahan ini dapat didanai serta dilaksanakan oleh pemerintah (transmigrasi umum), atau atas biaya dan inisiatif sendiri (transmigrasi swakarsa/ swadana/ spontan)	Jumlah calon transmigran diberangkatkan/ Target x 100%	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Urusan Pemerintahan						
32.1	Sekretariat Daerah			Persentase Peningkatan Reformasi Birokrasi General	Persentase ketercapaian atas bobot nilai Reformasi Birokrasi General	Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi General memiliki bobot 100, yang terdiri dari indikator: 1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 2. Indeks SPBE 3. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 4. Nilai SAKIP 5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						Zona Integritas 6. Tingkat Maturitas SPIP 7. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan 8. Survei Penilaian Integritas (SPI) 9. Indeks Kualitas Kebijakan 10. Indeks Reformasi Hukum 11. Tingkat Digitalisasi Arsip 12. Indeks Pembangunan Statistik 13. Indeks Tata Kelola Pengadaan 14. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						15. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 16. Indeks Sistem Merit 17. Indeks BerAkhlak 18. Survei Kepuasan Masyarakat 19. Indeks Pelayanan Publik 20. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	
32.2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi		Persentase Peningkatan Reformasi Birokrasi Tematik	upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (<i>debottlenecking</i>) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro	Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Tematik memiliki bobot 20 terhadap:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik 2. Capaian Indikator Dampak Reformasi Birokrasi Tematik pada tema prioritas nasional antara lain: a. Pengentasan Kemiskinan b. Peningkatan Investasi c. Mendorong Hilirisasi d. Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan e. Mendukung Ketahanan Pangan Nasional f. Mendorong Peningkatan Akses,	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	
32.3			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Pemda	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen Evaluasi SAKIP meliputi: 1. Perencanaan Kinerja (Total bobot: 30) 2. Pengukuran Kinerja (Total bobot: 30) 3. Pelaporan Kinerja (Total bobot: 15) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Total bobot: 25)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
32.4			Meningkatnya kualitas indeks reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum adalah proses monitoring dan evaluasi regulasi yang telah berjalan untuk memastikan regulasi yang dilaksanakan tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat atas. Penilaian ini bertujuan mengukur keberhasilan reformasi hukum melalui identifikasi, pemetaan, reregulasi, deregulasi, dan penguatan sistem regulasi nasional. Prinsip dasar penilaian IRH meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk memastikan regulasi sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Penilaian IRH juga dilakukan secara nasional melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi	Bepedoman pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lem-baga dan Pemerintah Daerah, dengan komponen penilaian meliputi: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/ Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (Bobot 25); 2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan yang	Kementerian Hukum Republik Indonesia

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	berkualitas (Bobot 25); 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturanperundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (Bobot 30); dan 4. Penataan basis data Peraturan Perundang-undangan (Bobot 20).	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
32.5			Meningkatnya Kematangan Organisasi Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	gambaran tentang tingkat kemampuan/kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi (aspek struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi) yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi, dengan tujuan sebagai peta jalan atau kerangka kerja yang menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi.	Total Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
32.6			Meningkatnya kualitas kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	Instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence based)	Instrumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) meliputi: 1. Profil (10%) 2. Perencanaan Kebijakan (20%) 3. Implementasi Kebijakan (25%) 4. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%)	Lembaga Administrasi Negara RI

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						5. Transparansi dan Partisipasi Publik (15%)	
32.7			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling.	Penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui sampling Unit Pelayanan Publik dengan menilai 6 aspek beserta bobotnya sebagai berikut: 1. Aspek Kebijakan Pelayanan (30%) 2. Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia (18%) 3. Aspek Sarpras Pelayanan Publik (15%) 4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%) 5. Aspek Konsultasi dan	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pengaduan (15%) 6. Inovasi (7%) dihitung dengan rumus: $\sum(\text{Nilai Aspek}(n) \times \text{Bobot Aspek}(n))$	
32.8			Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Maturitas SPIP	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur: a. SPIP; b. MRI;	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						c. IEPK; d. kapabilitas APIP	
32.9			Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rasio Pembelanjaan secara Kompetitif	perbandingan antara nilai belanja pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan penyedia secara kompetitif (tender/seleksi) terhadap total nilai belanja pengadaan barang/jasa yang dilakukan dalam satu tahun anggaran.	Rasio Pembelanjaan Secara Kompetitif= (Nilai belanja penyedia/Total Belanja Pengadaan) x 100 %	Sekretaris Daerah
32.10			Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Persentase unit kerja/instansi vertikal yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi)	persentase dari jumlah unit kerja/mitra bagian perekonomian terhadap total mitra bagian perekonomian	jumlah instansi yang terlibat dalam peningkatan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi)/mitra bag perekonomian*100 %	
			Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	Persentase unit kerja/instansi vertikal yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (tingkat kemiskinan)	persentase dari jumlah unit kerja/mitra bagian perekonomian terhadap total mitra bag kesra	jumlah instansi yang terlibat dalam kesejahteraan masy (tingkat kemiskinan)/mitra bag kesra*100%	

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
33.1		Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang	Hasil Pengukuran kualitas pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Berdasarkan total nilai persepsi pertanyaan Survei Kepuasan Masyarakat ke semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
33.2			Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase rata-rata realisasi 3 fungsi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pengawasan, Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Raperda)	Hasil rata-rata realisasi 3 tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Berdasarkan indikator 3 tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 1. Pembentukan Perda, 2. Anggaran, 3. Pengawasan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
34	Perencanaan						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
34.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan didukung Riset dan Inovasi		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil pengukuran kualitas perencanaan berdasarkan 3 Aspek: 1. sinergi perencanaan 2. kualitas perencanaan 3. keterhubungan perencanaan dengan perencanaan kinerja dan dengan perencanaan kinerja	Jumlah nilai indikator 3 Aspek: 1. sinergi perencanaan 2. kualitas perencanaan 3. keterhubungan perencanaan dengan perencanaan kinerja dan dengan perencanaan kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
34.2			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil pengukuran kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isu strategis - target - Program/Kegiatan/Proyek di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah	Jumlah nilai Aspek kualitas perencanaan dalam Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
35	Keuangan						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
35.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah		IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	IPKD= Σ (Nilai Indikator \times Bobot Indikator)	RPJMD, SIPD, LRA, LO, Neraca, Website resmi Pemda, PPID
35.2			Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah	Pernyataan profesional BPK yang menyimpulkan kewajaran penyajian informasi keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	Nilai opini Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
35.3			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Satuan ukuran yang menetapkan kualitas kinerja pengelolaan barang milik daerah (BMD) berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator, yang mencakup aspek akuntabilitas,	Berdasarkan Panduan Mendagri	Dokumen Perhitungan IPA, penilaian mandiri

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					produktivitas, kepatuhan, pengawasan, dan administrasi BMD untuk periode waktu tertentu		
35.4			Meningkatnya kemandirian keuangan Pemerintah Daerah	Nilai kemandirian keuangan Pemerintah Daerah	Ukuran kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibandingkan dengan total pendapatan.	Total PAD/Total Pendapatan Daerah	Laporan Realisasi Anggaran
36	Kepegawaian						
36.1	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Kepegawaian Daerah		Indeks Sistem Merit	Tingkat penerapan prinsip merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah, diukur berdasarkan 8 (delapan) aspek penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu: 1. Perencanaan Kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengembangan Karier ASN 4. Promosi dan Mutasi ASN 5. Manajemen Kinerja ASN	Indeks Sistem Merit= (Skor 8 Aspek: 8)	Komisi Aparatur Sipil Negara

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin ASN 7. Perlindungan dan Pelayanan ASN Sistem Informasi ASN		
36.2			Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks tingkat kepatuhan dan konsistensi instansi pemerintah dalam menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan indeks NSPK melalui perhitungan pemenuhan skor yang terdiri dari 18 elemen yaitu: 1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN; 2. Pengadaan ASN; 3. Pengangkatan ASN; 4. Pangkat; 5. Mutasi; 6. Jabatan; 7. Pengembangan Karier ASN; 8. Pola Karier;	Indeks NSPK= (Total Skor Jawaban: Total Skor Maksimum) x 100%	Badan Kepegawaian Negara (BKN)

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
					9. Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas; 10. Penghargaan; 11. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; 12. Perlindungan; 13. Penilaian Kinerja; 14. Cuti; 15. Kode Etik; 16. Disiplin; 17. Pemberhentian; dan 18. Pensiun.		
37	Pendidikan dan Pelatihan						
37.1			Meningkatnya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pegawai Yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dibandingkan dengan total jumlah ASN yang seharusnya mengikuti pengembangan kompetensi sesuai Angka Kebutuhan Diklat	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional: AKD) x 100%	Bidang Pengembangan ASN (Diklat)
38	Penelitian dan Pengembangan						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
38.1	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan didukung Riset dan Inovasi		Kapabilitas Inovasi	Jumlah nilai dari indikator pembentuk Pilar 12 dari IDSD Kapabilitas Inovasi. Merupakan indikator pembentuk Pilar 12. Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain: keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang	Sesuai perhitungan BRIN komponen pembentuk penilaian terdiri dari keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merk dagang	Badan Riset dan Inovasi Nasional
38.2			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi daerah (IID)	IID adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Komponen penilaian IID adalah inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola dan inovasi lainnya	2 periode awal $T+1=T_0+0,25$ 2 periode akhir $T+1=T_0+0,6$	Kementerian Dalam Negeri
39	Inspektorat Daerah						

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
39.1		Meningkatkan kualitas pengawasan internal yang menjamin tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). IPKD dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi.	Berdasarkan capaian Indeks <i>Monitoring Controlling Surveillance for Prevention</i> (MCSP) dari KPK RI	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
39.2			Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai (level) Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan.	elemen kapabilitas APIP meliputi: kualitas peran dan layanan; a. profesionalisme penugasan; b. manajemen pengawasan; c. pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan; dan budaya dan hubungan organisasi.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
39.3			Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.	Indikator IEPK dikelompokkan menjadi 3 pilar yaitu:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kabupaten Semarang			a. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, b. Penerapan Strategi Pencegahan, c. Penanganan Kejadian Korupsi	
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
40.1		Meningkatkan Kualitas Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi		Jumlah Konflik Sosial	Indikator ini menggambarkan tingkat kondisi sosial masyarakat dan keberhasilan upaya dalam pencegahan serta penanganan konflik sosial di daerah	Jumlah Konflik Sosial yang terjadi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029
40.2			Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan kebangsaan	Presentase Antisipasi Konflik Sosial	Persentase keberhasilan dalam mencegah konflik sosial di daerah	Prosentase jumlah konflik sosial yang di tangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
40.3			Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pemilu	Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu	Tingkat keikutsertaan masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dalam memberikan suara pada pemilu baik pemilu presiden, legislatif maupun kepala daerah sebagai wujud partisipasi warga negara yang demokrasi	Jumlah Pemilih Pemula yang di bina dibagi jumlah pemilih pemula dikali 100 % di tambah jumlah pemilih perempuan yang di bina dibagi jumlah pemilih perempuan dikali 100% dibagi 2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
41	Unsur Penunjang Seluruh Perangkat Daerah						
41.1	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik		Meningkatnya kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah= Jumlah nilai konversi dibagi jumlah unsur pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat= $(X_1+X_2+\dots+X_n)/n$ Keterangan: X1, X2, ..., Xn: Nilai konversi tiap unsur pelayanan yang dihasilkan dari aplikasi ESurvei Kepuasan Masyarakat (https://eskm.kabsmg.id/)	Masing-masing Perangkat Daerah

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
						n: jumlah unsur pelayanan	
42	Kewilayahan						
42.1	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan akuntabilitas, transparansi dan digitalisasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan= Jumlah nilai konversi dibagi jumlah unsur pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat= $(X1+X2+.....+Xn)/n$ keterangan: X1, X2, ..., Xn: Nilai konversi tiap unsur pelayanan yang dihasilkan dari aplikasi ESurvei Kepuasan Masyarakat SMGKAB (https://eskm.kab.smg.id/) n: Jumlah unsur pelayanan	19 Kecamatan
42.2			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan	Persentase capaian kinerja kecamatan	Rata-rata capaian realisasi indikator program kecamatan x 100%	$((X1+X2+.....+Xn)/n) \times 100\%$ Keterangan: X1, X2, ..., Xn: Capaian realisasi indikator program kecamatan n: Jumlah program Kecamatan	19 Kecamatan

No.	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Penjelasan	Formulasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
42.3			Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah indikator kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang tercapai 100% dibagi jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintahan x 100%	$\frac{(X1+X2+\dots+Xn)}{n} \times 100\%$ keterangan: X1, X2, ..., Xn: Indikator kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang tercapai 100% n: Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintahan	19 Kecamatan

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA